**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Media massa sebagai alat penyebaran informasi, sudah ada sejak orang Eropa bercokol di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Keberadaan media massa telah memiliki peran yang penting bagi pemerintah maupun rakyat. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, berita, bahkan propaganda, sekaligus juga sarana komunikasi antar sesama orang Eropa maupun dengan rakyat jajahannya. Pada masa VOC, media cetak pertama yang diterbitkan adalah *Bataviasche Nouvelles* yang memuat informasi-informasi mengenai pemerintahan VOC, perdagangan, hiburan, iklan lelang dan sejarah koloni Belanda di Hindia dan juga tentang penyebaran Agama Katolik dan Protestan, serta perkembangan gereja di Hindia.

Pada awal kedatangannya hingga kemudian membentuk VOC, Belanda memanfaatkan media massa sebagai alat komunikasi antar sesama pedagang yang tergabung dalam VOC. Media ini dikenal dengan nama *Bataviasche Nouvelless* yang terbit sekali dalam seminggu dengan jumlah halaman sebanyak empat lembar folio yang ditulis tangan.

*Bataviasche Nouvelless* memuat mengenai informasi-informasi pemerintahan VOC, perdagangan, iklan kaleng, hiburan, serta kisah-kisah perjalanan atau sejarah koloni Belanda di Hindia Belanda. Namun beberapa tahun kemudian setelah terbit, koran ini di *breidel* oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membocorkan kebijakan pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul koran-koran lain yang berisikan berita maupun hiburan, serta juga sarana kritik untuk pejabat pemerintahan. Sepertipada tahun 1903, dimana pers mulai menghangat, banyak petinggi pemerintahan yang menuliskan kritik terhadap pejabat pemerintahan yang menjadi atasannya. Kritikan ini tidak membuat marah para pejabat pemerintahan, melainkan mendorong mereka untuk membuat kebijakan baru yang menguntungkan masyarakat pribumi. Hal ini juga kemudian mengilhami rakyat pribumi untuk mengajukan kritik terhadap pemerintah melalui media massa. Oleh sebab itu, mulai bermunculan berbagai media massa seperti koran dan majalah dikalangan rakyat, seperti *Medan Prijaji*, *Otoesan Hindia* dan banyak lagi lainnya.

Kemunculan media ini dilatarbelakangi oleh kesadaran sebagian pribumi bahwa media memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai penyampai informasidan juga dapat dimanfaatkan untuk menggugah rasa nasionalisme rakyat sebagai rakyat terjajah. Hal ini seperti yang ditulis *Medan Prijaji*dibawah judul korannya yang berbunyi: *Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranja.* Dengan kata lain, *Medan Prijaji* ingin menekankan bahwa orang-orang pribumi juga memiliki hak untuk menyuarakan isi hatinya, untuk itu *Medan Prijaji* hadir sebagai media yang menampung kritikan maupun suara dari rakyat pribumi.

Media yang berkembang pada awal abad 20 sebagian telah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda dengan syarat, informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan media yang digunakan untuk menggugah rasa nasionalisme rakyat biasanya disebarkan secara sembunyi-sembunyi diantara kalangan rakyat. Hal ini terus berkembang seiring perjalanan bangsa Belanda di Indonesia.

Satu hal yang cukup menarik dalam perkembangan media massa pada zaman kolonial adalahbahwa, media massa kemudian muncul untuk meminimalisir dampak dari terorisme dan perang. Sepanjang perjalanan praktek kolonialisme di Indonesia, telah terjadi banyak sekali perperangan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi, kelompok ekstrimis, maupun pemberontak. Dalam hal ini, media massa saat itu kemudikan hadir dengan pemberitaan yang justru meredam efek dari perang dan kerusuhan tersebut.

Dampak buruk dari perang dan kerusuhan yang terjadi tidak diberitakan dengan gamblang, namun hanya tersirat saja. Jumlah korban bahkan tidak disebutkan sama sekali. Hal ini bertujuan untuk meredam efek dari perang dan kerusuhan yang terjadi tersebut, sehingga masyarakat Eropa dan pribumi, yang berada di luar wilayah terjadinya perang dan kerusuhan, tidak terlalu merasakan efek dari perang tersebut. Hal ini menjadi tujuan utama dari media tersebut, yaitu untuk meminimalisir efek dari perang dan kerusuhan tersebut, sehingga tidak menjalar kemana-mana.

Misalnya dalam laporan surat kabar *DeVrije Pers* dan *DeVolksrant* pada Februari 1946*,* setelah orang Eropa dan sebagian orang Indo-Eropa dipindahkan dari Pekanbaru ke Padang untuk kemudian dievakuasi ke Batavia, bangsa Tionghoa, India dan pribumi yang menjadi sasaran kekerasan, menyurati komandan pasukan Belanda saat itu yang berada di Padang, Sumatera Barat, untuk meminta bantuan, karena telah terjadi aksi teror oleh kelompok bersenjata yang mengaku dirinya kelompok *republikeun* di wilayah kediaman mereka.

Pemberitaan yang beredar di dua surat kabar tersebut hanya sebatas itu saja, padahal menurut laporan *NEFIS*, lembaga intelijen Belanda saat itu, terjadi aksi teror yang mengerikan di beberapa wilayah hunian Tionghoa tersebut. Kelompok tersebut menjarah semua barang yang mereka miliki secara paksa dan dengan kekerasan. Perempuan bahkan diculik untuk diperkosa dan kemudian dibunuh. Di wilayah Jambi tidak jauh berbeda.

Setelah orang Eropa selesai dievakuasi ke Padang dan Palembang pada tahun 1946, terjadi teror mengerikan terhadap sisa orang Indo-Eropa, orang Tionghoa, India dan masyarakat pribumi. Pemukiman masyarakat yang berada disatu wilayah dengan orang Eropa, dan merupakan distrik bisnis di Jambi kemudian dibakar oleh kelompok pejuang revolusi yang pada saat itu terdiri dari orang komunis dan tentara berseragam. Lebih dari 2/3 wilayah sentra bisnis tersebut hangus dibakar. Hunian orang Eropa, Tionghoa, India dan masyarakat lokal hancur total. Sekitar 7000 orang Tionghoa, 500 orang India, dan puluhan masyarakat lokal kehilangan tempat tinggal.

Kedua surat kabar tersebut tidak mengabarkan aksi teror tersebut dengan gamblang dan massif. Hal ini merupakan strategi propaganda dari tentara Belanda saat itu untuk meredam efek teror yang memang sengaja dibuat oleh tentara pribumi untuk membuat gentar tentara Belanda dan simpatisannya.

Sementara itu, dalam pemerintahan Indonesia hari ini justru kita dapat melihat bahwa media massa saat ini seolah-olah terbagi menjadi dua fungsi, sebagai pelindung bagi para pejabat pemerintahan, dan sebagai penyebar propaganda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi saat ini, dimana ketika ada pejabat pemerintahan yang bermasalah justru berita yang ditampilkan di televisi maupun koran tidak menyorot peristiwa apa yang terjadi, melainkan seringkali menyorot hal lain yang kurang penting atau tidak berhubungan dengan permasalahan pejabat pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, media hari ini sebagai pengalihan isu-isu yang berkembang di tubuh pemerintahan, yang cenderung tidak netral dalam menyebarkan pemberitaan, dan hadir sebagai bentuk tendensi penguasa atau pemerintah.Selain itu, media juga muncul menjadi senjata ampuh untuk menyebarkan isu-isu sensitif seperti isu SARA yang sangat mudah membakarnya.

Menurut Elvinaro dalam bukunya Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, fungsi media massa bisa dibagi menjadi lima, yaitu; a) Pengawasan (*surveillance*), b) Penafsiran (*Interpretation*), c) Pertalian (*Linkage*), d) Penyebaran Nilai – Nilai (*TransmissionofValue*), e) Hiburan (*Entertainment*) (*Ardianto 2007: 14-17*).

Media massa seharusnya hadir berdasarkan fungsinya tersebut. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Herman dan Chomsky mengingatkan, media selalu berada dalam risiko untuk dimanipulasi dan digunakan oleh “kelompok-kelompok istimewa” yang lebih berkuasa dibanding kelompok lain dalam masyarakat. Sementara pihak yang lebih kuat mendapat banyak keuntungan, pihak yang lebih lemah kehilangan hak istimewanya sebagai kumpulan aktor aktif di ranah publik.

Kepentingan masyarakat, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan, dibiarkan begitu saja karena aspirasi utama manipulasi ini adalah untuk memperta-hankan dominasi kekuasaan dalam masyarakat. Tiga model agen alternatif ini : a) stabilitas, b) pengendalian dan c) perubahan merupakan fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pers sebagai institusi politik.

Ini dapat memunculkan asumsi bahwa bahwa pers menampilkan peran politik yang spesifik dalam masyarakat tertentu pada suatu titik waktu tertentu pula, kajian mengenai media di negara berkembang cenderung lebih menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat propaganda negara atau menjadi alat kepentingan untuk melestarikan ideologi penguasa (hegemoni). Dalam hal ini, ada kepentingan yang cukup signifikan dari pemegang kekuasaan untuk menggunakan media sebagai alat politik dalam mencapai tujuannya (Noris 2001:23-26).

Saat Pemilu 2019 lalu, kita secara langsung dapat melihat beberapa media cenderung memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu calon dengan memberitakan kegiatan-kegiatan kampanye salah satu calon dan memberikan berita negatif mengenai calon lainnya. Disini dapat dilihat bahwa media kemudian mengalami perubahan dari masa ke masa, dan perubahan ini menarik untuk dilihat lebih jauh, apa yang menyebabkan perubahan ini? Bagaimana perkembangan media saat ini dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat luas?

Dalam pemberitaan mengenai terorisme, media hari ini bahkan sangat terbuka dalam memberitakannya. Bahkan penangkapan anggota terorisme yang di dalamnya memuat aksi tembak-menembak juga disiarkan secara langsung. Tidak hanya itu saja, aksi terorisme dalam bentuk pengeboman juga disiarkan secara langsung dan detail oleh media hari ini. Bahkan mayat korban juga dipertontonkan, walaupun diberi sedikit efek blur. Pada sebuah peristiwa yang menghebohkan tentang penyerangan terhadap mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu, selama beberapa hari media hanya memberitakan mengenai penusukan ini saja, bahkanberbagai asumsi dan spekulasi bermunculan untuk menggiring opini masyarakat.

Hal yang seperti ini tentu saja tidak akan ditemukan dalam media cetak masa kolonial. Seorang pejabat yang ditusuk rakyat biasa, tentu akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah saat itu. Sungguh sangat berbeda dengan yang terjadi hari ini.Dalam hal ini media massa memainkan fungsinya sebagai alat propaganda.

Propaganda memang tidak selalu diasumsikan negatif. Ia adalah ibarat dua sisi mata uang. Bisa saja bermakna negatif atau positif, sangat tergantung pada peran pihak-pihak yang melakukan propaganda. Demikian pula dengan media massa, sebagai bagian yang hampir tak terpisahkan dari propaganda itu sendiri. Media massa dapat saja menjadi alat propaganda penyebar paham menyesatkan dan sebaliknya dapat pula menjadi alat propaganda positif guna melawan usaha-usaha propaganda bersifat negatif.

Penggunaan media massa oleh gerakan-gerakan radikal sebenarnya memang bukanlah fenomena baru, namun peristiwa 11 september 2001 lalu memunculkan kembali isu radikalisme atau *terrorism based on religion* dan gaungnya masih menjadi isu kontroversial dan sentral dalam bidang keamanan dunia. Kontroversi Al-Qaeda dan gerakan-gerakan Islam radikal lainnya yang menyuarakan simbol-simbol Islam yang mereka bawa secara langsung berdampak pada kaum muslim global dan mempengaruhi peta konflik dunia. Bahkan belakangan ini isu-isu radikalisme Islam kembali mencuat dengan lahirnya ISIS yang dengan cepat mendunia dan menjadi topik global paska mereka meng-upload video sadis pembunuhan wartawan AS di Youtube.

Pesan kengerian tersampaikan dengan cepat dan sekaligus menunjukkan eksistensi gerakan mereka. ISIS, sama halnya dengan gerakan-gerakan yang dinilai ekstrim dan terror lainnya, ikut menggunakan media massa untuk menarik minat para anggota mereka yang tidak hanya datang dari sekitar Irak dan Suriah saja, tapi berhasil menarik simpati dunia. Di Indonesia, gerakan ini telah ditetapkan sebagai gerakan terlarang oleh pemerintah, para ulama, bahkan masyarakat sendiri melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya ISIS.

Awal abad ke-20 dan masa Reformasi tahun 1998 diambil sebagai batasan waktu dalam penelitian ini disebabkan karena perbedaan fungsi media yang sangat signifikan di Indonesia terjadi pada periode tersebut. Periode lainnya seperti Masa Revolusi, Orde Lama dan Orde Baru, fungsi media massa tidak jauh berbeda seperti yang ada pada masa kolonial. Sedangkan pada masa reformasi, fungsi media massa benar-benar berubah dari beberapa periode sebelumnya. Oleh karena hal inilah kemudian penulis mengambil dua periode ini sebagai bahan penelitian.

* 1. **Perumusan Masalah**

Melihat latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan permasalahan, yaitu bagaimana transformasi pemberitaan tentang aksi terorisme di era kolonial Belanda dan pasca reformasi.

 Pertanyaan penelitian yang muncul dari rumusan masalah tersebut adalah, Bagaimana transformasi pemberitaan terorisme di era penjajahan Belanda hingga pasca reformasi?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat bagaimana perkembangan jurnalisme pada awal abad ke-20 hingga zaman reformasi
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perkembangan pemberitaan terorisme di media cetak.

**1.4. Manfaat Penelitian**

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan studi transformasi media.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti, manfaat penelitian ini adalah dapat menambah wawasan Ilmu Komunikasi khususnya transformasi media.
2. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pola-pola transformasi media di Indonesia.